

**SKRIPSI**

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2023**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Serjana (S1)**

**Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

## HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja  
Daerah (APBD) Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023

Diajukan Oleh:

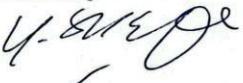
**AIDIN**  
202010050311104

Telah disetujui  
Pada hari / tanggal, rabu, 24 Juli 2024

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

  
Muhammad Kamil, S.I.P., M.A.

Pembimbing

  
Yana Syafriyana Hijri, S.I.P., M.I.P.



## HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN

### S K R I P S I

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**AIDIN  
202010050311104**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
dan dinyatakan  
**L U L U S**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan  
Pada hari Rabu, 24 Juli 2024  
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. Drs. Krishno Hadi, M.A
2. Ali Roziqin, S.A.P., MPA
3. Yana Syafriyana Hijri, S.I.P., M.IP



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aidin  
NIM : 202010050311104  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul : Fungsi DPRD dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bima di bidang pendidikan. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2024 Yang Menyatakan,



AIDIN



Kampus I  
Jl. Bendungan I Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 562 0235 (Hunting)  
F. +62 341 450 435

Kampus II  
Jl. Bendungan Sulami No.168 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Hunting)  
F. +62 341 562 050

Kampus III  
Jl. Raya Tlogomas No.348 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 464 318 (Hunting)  
F. +62 341 450 435  
E. webmaster@umem.ac.id

## HALAMAN CEK PLAGIASI



### LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144  
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

#### SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama	:	Aidin
NIM	:	202010050311104
Judul TA/Skripsi	:	Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023
Pembimbing	:	Yana Syafriyana Hijri, S.I.P.,M.I.P.

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	10%	1%	97%	1%	3%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd



Malang, 15 Agustus 2024

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.I.P., MA

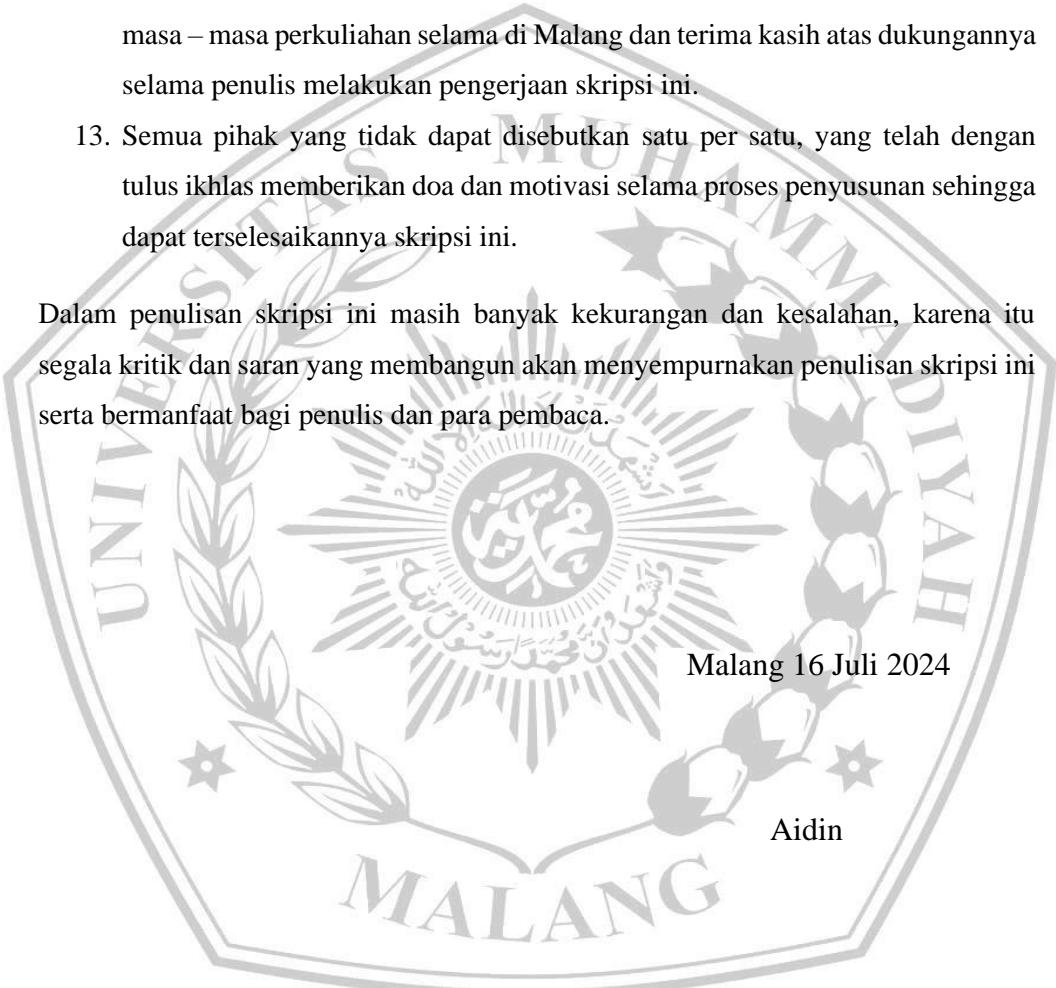
## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala rahmat puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023**” dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunannya, penulis banyak menemukan berbagai kendala dan kesulitan, namun berkat niat, usaha, dan doa serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini akan jauh lebih sulit dari yang dijalankan. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Muslimin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.I.P., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nuhammadiyah Malang.
4. Bapak Yana Syafriyana Hijri, S.I.P., M.IP selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan membagi ilmu serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
6. Pihak anggota DPRD Kabupaten Bima khususnya kepada seluruh anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Bima karena telah memberikan arahan, bantuan, motivasi serta telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan istansi.
7. Teristimewa kepada kedua Orang tua dan semua Saudara kandung yang sudah selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, semangat serta dukungan yang sangat luar biasa dari segi moril maupun material bagi penulis.
8. Untuk diriku yang sudah berusaha keras, Terima kasih untuk segalanya.

9. Kepada keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Kepada sahabat dan teman masa kecil, terima kasih untuk segala dukungan, doa, dan semangat yang diberikan walau berada di Kota yang berbeda.
11. Teman-teman sepermainan selama di malang,terima kasih atas kesenangan, waktu, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis.
12. Teman – teman Ilmu Pemerintahan C angkatan 2020 yang telah menemani masa – masa perkuliahan selama di Malang dan terima kasih atas dukungannya selama penulis melakukan pengerjaan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi selama proses penyusunan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.



Malang 16 Juli 2024

Aidin

## **ABSTARK**

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian yang telah memiliki tujuan akhir. DPRD sebagai penyambung aspirasi rakyat, harus mampu memberikan regulasi yang pro rakyat. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait keberadaan DPRD Kabupaten Bima dalam mengawasi bidang Pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945. Fungsi pengawasan ini untuk mengetahui tujuan dari mutu Pendidikan tersebut. Karena pengawasan DPRD mencakup: memantau, membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan dalam meningkatkan mutu Pendidikan, dengan melaksanakan sesuai aturan yang ada.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan teknik analisis objek penelitian dengan menggunakan kajian maupun teori tertentu yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1) Fungsi DPRD Komisi IV Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap APBD Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bima pengawasan dilakukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Bima dapat berimplikasi kepada kebijakan penganggaran, kebijakan peraturan, maupun kebijakan lain yang dapat berdampak terhadap kebijakan Kepala Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bima. 2) Permasalahan yang dihadapai oleh DPRD Komisi IV dalam memaksimalkan fungsi pengawasan APBD Di Bidang Pendidikan bahwa DPRD kabupaten Bima menggunakan cara yang normative tanpa adanya upaya lebih lanjut dalam menyiapkan metode yang cukup untuk melakukan kontrol secara efektif.

**Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, DPRD Terhadap APBD**

## **ABSTRACT**

The Republic of Indonesia is an independent and sovereign nation, where local governments are integral parts with their own ultimate goals. The Regional House of Representatives (DPRD), as the voice of the people's aspirations, must be able to provide regulations that are pro-people. In this research, the author will analyze the role of the DPRD of Bima Regency in overseeing the education sector in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. This supervisory function aims to determine the objectives of education quality. The oversight by the DPRD includes monitoring, reporting, and executing the supervisory function to enhance the quality of education by adhering to the existing regulations.

The research method used in this study is a qualitative descriptive method, which involves analyzing the research object using specific studies or theories and then presenting the findings in a descriptive form.

The conclusions of this research are as follows: 1) The role of Commission IV of the DPRD in overseeing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the education sector of Bima Regency is to improve the quality of education in the region. This oversight can influence budgeting policies, regulatory policies, and other policies that may impact the policies of the Regional Head through the relevant Regional Government Organizations, in this case, the Bima Regency Education Office. 2) The issues faced by Commission IV of the DPRD in maximizing the oversight function of the APBD in the education sector include the fact that the DPRD of Bima Regency uses normative methods without further efforts to prepare sufficient methods for effective control.

**Keywords:** **Function, Supervision, DPRD on APBD**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTARK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat penelitian .....	8
1.5 Definisi konseptual .....	9
1.5.1 Pengawasan DPRD terhadap dinas Pendidikan kabupaten bima.....	9
1.6 Kerangka Berfikir .....	11
1.7 Definisi Operasional .....	12
1.7.1 Fungsi Pengawasan DPRD dalam apbd bidang Pendidikan kabupaten bima tahun 2023	12
1.7.2 Permasalahan yang di hadapi dalam pengawasan anggaran apbd bidang Pendidikan tahun 2023.....	13
1.8 Metode penelitian .....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
1.8.3 Jenis Data .....	13
1.9 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.10 Teknik Analisis Data .....	15

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 16**

2.1	Penelitian Terdahulu .....	16
2.2	Kerangka Teori .....	18
2.2.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	18
2.2.2	Hak Dan Kewajiban DPRD .....	23
2.2.3	Fungsi Pengawasan Oleh DPRD.....	23
2.2.4	Pengertian Pengawasan.....	25
2.2.5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	28
2.3	Pengawasan Anggaran di Bidang Pendidikan .....	31
2.3.1	Teori Pengawasan .....	31
2.3.2	Pengertian Alokasi Anggaran Pendidikan .....	32
2.3.3	Asas-asas anggaran Pendidikan .....	34
2.3.4	Fungsi Anggaran Pendidikan .....	34
2.3.5	Prinsip Penyusunan Anggaran Pendidikan .....	35

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... 37**

3.1	Sejarah .....	37
3.2	Deskripsi Wilayah.....	39
3.3	Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Bima.....	40
3.2.1	Geografis .....	40
3.4	Topografi .....	40
3.5	Demografi .....	41
3.4.1	Keadaan Sosial Budaya Kabupaten Bima.....	41
3.4.2	Kondisi Ekonomi Masyarakat Bima .....	41
3.6	Profil DPRD.....	42
3.5.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.....	42
3.5.2	Fraksi DPRD Kabupaten Bima .....	43
3.5.3	Alat dan Kelengkapan DPRD kabupaten Bima .....	44

**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....47**

4.1	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	47
4.1.1	Fungsi DPRD Komisi IV Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap APBD Di	
	vii	

Bidang Pendidikan Kabupaten Bima .....	48
4.1.3 Standar kinerja pengawasan DPRD komisi IV kabupaten bima.....	59
4.1.4 Permasalahan yang dihadapi oleh DPRD dalam mengawasi Anggaran bidang Pendidikan.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 3. 1 LOKASI KABUPATEN BIMA DALAM PETA PROVINSI NTB .....	40
GAMBAR 3. 2 KONDISI SEKOLAH .....	59



## **DAFTAR BAGAN**

BAGAN 1. 1 KERANGKA BERPIKIR .....	11
BAGAN 1. 2 STRUKTUR ORGANISASI DPRD KABUPATEN BIMA.....	46



## **DAFTAR TABEL**

TABEL 4 1 TARGET DAN REALISASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN DOKUMEN RANCANGAN DAERAH 2023 .....	49
TABEL 4 2 JUMLAH AUDENSI MASYARAKAT KE DPRD KAB. BIMA PRIODE 2019-2024.....	51
TABEL 4 3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2021-2023 .....	53
TABEL 4 4 RANGKUMAN KEGIATAN RESES DPRD KOMISI IV KABUPATEN BIMA TAHUN 2023.	56
TABEL 4 5 APBD BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 .....	58
TABEL 4 6 MEKANISME PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BIMA TERHADAP BIDANG PENDIDIKAN.....	60



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Roza D. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Pasaman. Abstrak Penelitian Sarjana Fakultas Pascasarjana Universitas Bung Hatta. 2014 15 Maret;4(4).
- Riana, Alfi, Dan Mustofa Kamal Rokan. "Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Serdang Bedagai." 5.3 (2021): 8161-8167.*Jurnal Pendidikan Tambusai Silaban*, Bd (2023). Pelaksanaan Kewenangan Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan Di Kabupaten Tapanuli Utara.
- Ningsi, W.D.S.N., 2018. Efektifitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Penanggulangan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn)(Studi Di Dprd Kota Malang). *Semangat Hukum*, 1(2).
- Hariati, Hariati. "Studi Tentang Kinerja Pengawasan Dan Penganggaran Anggota Dprd Kabupaten Bima." 4.2 (2021): 125-135.*Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*
- Riana, Alfi, Dan Mustofa Kamal Rokan. "Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Serdang Bedagai." 5.3 (2021): 8161-8167.*Jurnal Pendidikan Tambusai Kartikasari D. Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dprd Kabupaten Boyolali). Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. 2012.*
- Dis. Uin Raden Intan Lampung, 2019.*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Apbd (Studi Di Kabupaten Lampung Utara)*

Suwardi, Dedy. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Apbd (Studi Di Kabupaten Lampung Utara)." Phd Dis., Uin Raden Intan Lampung, 2019.

Restu, Praska Gian. . Dis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020. *Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Klaten Terhadap Pelaksanaan Apbd 2018-2019 Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Klaten*

(Disertasi Doktor, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). *Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Klaten Terhadap Pelaksanaan Apbd 2018-2019 Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Klaten*

Rahma, Siti Nur. *Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros.* Diss. Universitas Hasanuddin, 2008.

Ningrum, Berlian Puspita, and Andri Soemitra. "PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA MEDAN." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 2.1 (2023): 51-60.

Mengko, Veren Anggreyni. "FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI KOTA MANADO." *LEX PRIVATUM* 13.3 (2024).

SANDIATA, VALENT, Primus Aryesam, and Steven Yohanes Pailah. *PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.* Diss. UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO, 2023.

Risna, Risna. *Analisis Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang.* Diss. IAIN PAREPARE, 2023.

Aini, Putri Diyan Nur, et al. "PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK." *Semarang Law Review (SLR)* 5.1 (2024): 89-101.

Santoso, Jonathan, et al. "Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah." *Pagaruyuang Law Journal* 7.1 (2023): 155-166.

Arega, Irhamsyah Inta. *Implementasi Peran DPRD dalam melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu Tengah*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Hasis, Ellsa Lettryana, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 2.3 (2024): 64-77.

Anshori, Bayu, and Rahmat Rahmat. "PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2021." *Ex-Officio Law Review* 2.2 (2023): 107-116.

Fauziah, Firdah. *PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUBANG DALAM PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2021 (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Fiqh Siyasah)*. Diss. S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ, 2023.

TINAMBUNAN, GUNTUR PANGERAN UOSIA. "TUGAS DAN FUNGSI POKOK WEWENANG BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)." (2023).

Sunarding, Sunarding, and Umar Laila. "ANALISIS HUKUM SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA PALOPO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN AHKIR TAHUN WALIKOTA PALOPO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2024): 28-44.

Maulana, Rama, and Salsa Zaira Novita Dewi. "Studi Kasus Pengelolaan APBD Dalam Meningkatkan Infrastruktur di Kabupaten Sukabumi." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. 3. 2023.

Adnantara, Kadek Frediandrika. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat kota Denpasar terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5.1 (2023): 339-352.